



DEWAN BADUNG

Sinyal Hibah Cair, Sumringah

KEGIGIHAN anggota dewan Badung memperjuangkan kepentingannya sendiri mengatasnamakan masyarakat, mulai menampakkan hasil. Hal ini menyusul lampu hijau yang diberikan Pemprov Bali bisa mencairkan dana hibah yang membeku selama ini. Kabar ini didapat setelah rombongan anggota dewan Badung menemui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Cokorda Ngurah Pемыayun.

Rombongan anggota dewan dipimpin Wakil ketua DPRD Badung yang juga Kordinator Banggar I Made Sunarta. Dikonfirmasi usai pertemuan, Sunarta menjelaskan, hasil konsultasi dengan Sekprov telah disiapkan Pergub terkait pencairan dana hibah yang ngadat akibat terhalang UU Nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah. "Kalau di provinsi ada Pergub, di kabupaten Badung juga wajib dibuatkan Perbup (peraturan bupati) yang nantinya Perbup tersebut akan diverifikasi ke Gubernur Bali," kata Sunarta kemarin (25/9).

Dengan Pergub tersebut, politisi Demokrat ini optimis hibah yang selama ini ngadat akan bisa terelalisasi. Namun untuk menindaklanjuti Pergub tersebut, menurut Sunarta, Pemkab Badung juga harus membuat payung hukum tersendiri. Yakni berupa peraturan bupati. "Dengan pergub kemungkinan besar bisa cair," harapnya.

Sementara Ketua Komisi II Nyoman Dirga Yusa menyebut, hasil konsultasi di Pemprov Bali merupakan tantangan bagi Sekkab Badung sebagai Ketua TPAD. "Sekarang Sekda a mampu tidak menerjemahkan hasil konsultasi tersebut, sehingga hibah bisa cair," ucap Dirga Ysa.

Pasca koordinasi dengan Sekprov itu, Dirga mengaku sudah langsung memanggil Sekda Badung Kompyang R Swandika dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung untuk menindaklanjuti koordinasi Banggar dengan Pemprov tersebut. Pihaknya menginginkan agar hasil pertemuan dengan pihak pemprov tersebut tidak ikut macet gara-gara kurang sigapnya eksekutif. "Secara psikologis beban hibah ini berkaitan dengan janji-janji politik kami sebagai anggota dewan," ungkap politisi PDIP itu.

Nah, oleh karena itu ia mendesak agar persoalan hibah ini tindaklanjuti secara serius. Pasalnya, hibah diterima dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dirga menyebut sekarang tergantung eksekutif dalam menerjemahkannya. "Lampu hijau sudah ada dari provinsi. Tapi, kan kembali lagi ke penjabat Badung. Mampu nggak mereka menerjemahkan koordinasi dengan provinsi itu," sindirnya.

Dalam kunjungan yang diikuti oleh anggota banggar Nyoman Satria, Nyoman Dirga Yusa, A.A Ketut Agus Nadi Putra, Wayan Suyasa, IGN Shaskara dan Sekwan Badung Made Wira Dharmajaya. Setelah konsultasi tersebut Banggar langsung melakukan rapat kerja dengan Sekkab Badung yang juga Ketua TPAD Badung, Kompyang R Swandika untuk menyikapi hasil konsultasi tersebut. (san/han)

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 24



Menkeu

Ditodong Jalur Shortcut

LOVINA - Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro, melakukan kunjungan ke Kabupaten Buleleng, sekaligus membuka sosialisasi bertajuk Kebijakan Dana Desa. Dalam kunjungannya itu, Menkeu sempat ditodong dana untuk pembangunan jalur shortcut Denpasar-Singaraja, sehingga akselerasi pembangunan perekonomian di Buleleng dapat terealisasi.

Kunjungan itu dilakukan Menkeu di Hotel Melka Lovina, Jumat (25/9) kemarin. Dalam kesempatan itu hadir pula Anggota Komisi IX DPR-RI, IGA Rai Wirajaya, yang juga berasal dari daerah pemilihan Bali.

Saat memberikan sambutan selamat datang, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana langsung memanfaatkan momen itu untuk menodong biaya pembangunan shortcut Singaraja-Denpasar kepada Menkeu. Agus mengaku sudah menjalin komunikasi secara intens dengan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum, dengan harapan proyek short cut Denpasar-Singaraja dapat dibangun dalam waktu dekat ini.

Agus menilai pembangunan shortcut Denpasar-Singaraja adalah kunci utama pemerataan pembangunan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. "Kami mengerti bahwa proyek ini menjadi kewenangan Kementerian PU. Tapi karena bapak yang mengatur alokasi keuangan negara, dengan kerendahan hati, kami mohon agar bapak bisa memberi uang untuk pembangunan shortcut pada Kementerian PU," kata Agus.

Mantan Ketua Komisi III DPRD Bali itu mengklaim pemban-

Kami mengerti bahwa proyek ini menjadi kewenangan Kementerian PU. Tapi karena Bapak yang mengatur alokasi keuangan negara, dengan kerendahan hati, kami mohon agar Bapak bisa memberi uang untuk pembangunan shortcut pada Kementerian PU."

PUTU AGUS SURADNYANA
Bupati Buleleng

gunaan shortcut itu akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi bagi Buleleng. Bukan hanya mempermudah akses wisatawan mancanegara dari Denpasar menuju Buleleng, namun juga mempermudah akses petani ke pasar-pasar besar yang ada di Bali Selatan. Sehingga beban biaya transportasi yang selama ini besar, dapat dikurangi.

Mendengar penjelasan dari

Agus, Menkeu Bambang hanya manggut-manggut mendengarkannya. Dalam sambutannya, Bambang justru lebih banyak menyinggung soal pemanfaatan dana desa. Namun keduanya terlihat terlibat pembicaraan serius, setelah sesi hiburan usai. Keduanya juga disebut saling

bertukar nomor ponsel.

Ditemui sebelum meninggalkan lokasi kegiatan, lebih banyak menyinggung soal pemanfaatan dana desa. Bambang menyebut Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 36,8 miliar bagi desa-desa yang ada di Buleleng. Kini dana

yang ditransfer ke daerah sebesar Rp 29,4 miliar, atau sekitar 80 persen lebih. "Sisanya yang 20 persen, minggu kedua bulan Oktober ini sudah kita transfer ke daerah," katanya.

Selain itu Bambang juga meminta agar pemerintah daerah bersama dewan, mengendalikankan penambahan jumlah desa, sehingga alokasi dana Rp 1 miliar per desa, dapat terealisasi. Karena secara nasional, pada akhir tahun 2014, jumlah desa di seluruh Indonesia sebanyak 74.093 desa. Namun pada pertengahan tahun 2015, jumlah desa telah menjadi 74.754 desa, atau bertambah sebanyak 661 desa. (eps/gup)



Radar Bali



KADEK MERTAWAN/RADAR BALI

SAH: Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi (tiga dari kiri) saat paripurna.

Perubahan APBD 2015 Disahkan

AMLAPURA - Setelah melakukan pembahasan siang dan malam, DPRD Karangasem, menyetujui Perubahan APBD 2015, pada rapat paripurna, yang digelar di gedung DPRD Karangasem, Jumat (25/9) siang. Rapat paripurna kemarin, dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, dihadiri Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda.

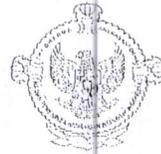
Meskipun menyetujui pengesahan Perubahan APBD 2015, tersebut. Masing-masing fraksi di DPRD Karangasem, memberikan sejumlah catatan, yang dibacakan I Nyoman Ada, dari Fraksi Bhineka. Salah satu yang menjadi sorotan DPRD Karangasem, soal rencana pelaksanaan Pilkel serentak di Karangasem, yang pencoblosannya dijadwalkan pada 31 Oktober tahun ini. Sedikitnya, ada empat fraksi yang menyinggung pelaksanaan Pilkel yang belum jelas bakal bisa dilaksanakan itu. Diantaranya, Fraksi Bhineka, Nasdem, Demokrat, dan Partai Golkar. "Partai Demokrat tetap berharap (Pilkel) dapat terlaksana sesuai jadwal. Bilamana karena alasan teknis harus diundur, agar SKPD terkait dapat mengklarifikasi ke desa-desa, yang melaksanakan Pikel 31 Oktober 2015," ujar Ada.

Fraksi Demokrat, juga mendorong, ketika waktu pelaksanaan Pilkel harus mundur, maka mundurnya tidak terlalu lama, dan wajib hukumnya tidak molor untuk kedua kali. Sedangkan Fraksi Golkar mengingatkan eksekutif agar pelaksanaan Pikel tidak menjadi temuan BPK, karena anggaran sudah terpasang. Anggaran itu, juga sudah tertuang dalam dokumen kebijakan KUPA dan PPAS-P. Fraksi Golkar, juga mengharapkan eksekutif, mempertimbangkan potensi gejolak masyarakat karena Pilkel seolah-olah ada muatan politik.

Sebagaimana diketahui, ada sebanyak 40 desa di Karangasem, yang dijadwalkan mengikuti Pilkel serentak, 31 Oktober 2015. Meski belum tentu bisa dilaksanakan tahun ini, panitia Pilkel tetap menjalankan tahapan Pilkel, yang saat ini sudah penetapan calon. Ketika Pilkel itu harus mundur, maka tahapan yang sudah berjalan tahun ini tinggal dilanjutkan tahun berikutnya. (wan/gup)

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 25



Potret Kemiskinan di Kabupaten Tabanan Lumpuh, Tinggal di Kamar Lantai

Tanah dan Bocor

Kelumpuhan yang dialami Dayu Ketut Nadi, 70, saat SD mengubah kehidupannya. Aktifitasnya terbatas karena berbagai kegiatan harus dilakukannya di dalam kamar ukuran 2 x 3 meter dengan atap bocor dan berlantaikan tanah. Tak jauh berbeda dengan Dewa Ketut Suarma, 40, buruh tani yang harus berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan dua anak gizi buruk.



DEWA RASTANA/RADAR BALI

DEWA RASTANA, *Tabanan*

MEMPRIHATIKAN: Dayu Ketut Nadi, yang lumpuh sejak SD dan hingga kini belum pernah menjalani pengobatan.

MELAKUKAN segala aktifitas seorang diri sudah biasa dilakukan Dayu Ketut Nadi, 70, warga Banjar Abian Tuwung Kelod, Desa Abian Tuwung, Kediri, Tabanan. Ironisnya, selain seorang diri, nenek ini juga tidak bisa bergerak dengan luasa. Pасalnya sejak duduk di bangku kelas IV SD, kakinya lumpuh karena penyakit *hemiplegia* (kekuatan otot yang hilang sama sekali pada separuh tubuh, Red). Hal itu juga yang menyebabkan dirinya tidak menikah.

Anak keempat dari enam orang bersaudara, ini tinggal bersama adiknya, Ida Bagus Rai Adi, 67, yang sudah berkeluarga

► Baca **Lumpuh...** Hal 31

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal. : 21



Tak Pernah Terima Bantuan

■ LUMPUH...

Sambungan dari hal 21

Di rumah sang adik, nenek ini biasanya menghabiskan waktunya di kamarnya yang berukuran 2 x 3 meter. Semua kegiatan dilakukannya di kamar mungilnya tersebut. Mulai dari makan, tidur, hingga buang air besar dan buang air kecil. Tak ada yang mengurusnya.

Ditambah lagi suasana kamar yang pengap, berdebu, dan atap yang bocor. Bau menyengat juga menyambut kedatangan koran ini ke kamarnya yang berlantakan dengan lantai tanah yang cukup gembur. "Apa pun *tiang* lakukan di sini. Masak, makan, tidur," ujarnya.

Dirinya menambahkan jika makin hari kedua kakinya dirasakan semakin sakit sehingga membuat aktifitasnya berkurang. Sebab obat-obatan di warung yang dibelikan oleh adiknya tak bisa menghilangkan sakitnya. Sebotol minyak urut juga terlihat berada di dekatnya yang biasa digunakan untuk mengurut kakinya. "Kalau sakitnya datang, sudah minum obat beli di warung tapi masih saja sakit," ungkapnya sembari tersenyum.

Ketegaran nenek ini membuat siapa pun yang melihatnya bergeter. Di tengah keterbatasan yang ia miliki, dirinya masih berusaha bertahan hidup dengan *mejejaitan* yang nantinya akan dijual. "Ya kalau dapat Rp.1000,- sampai Rp 2.000,- kan bisa untuk membeli obat," imbuhnya kembali menggetarkan hati.

Karena keterbatasan gerak-

nya, kamar tersebut terlihat sangat berantakan dengan sebuah dipan berisi kasur lengkap dengan bantal. Selama ini dirinya tidak pernah menjalani pengobatan khusus seperti misalnya konsultasi ke dokter. Hanya dulu pernah pergi ke pengobatan non medis. Kini sesekali sang keponakan yang berprofesi sebagai perawat akan datang untuk memeriksanya. "Kalau saya sakit biasanya keponakan saya datang untuk memeriksa," imbuhnya.

Kendatipun demikian, Dayu Nadi enggan merepotkan adiknya yang baru saja ditinggal sang istri dan melakukan aktifitasnya sendiri. "Saya tidak mau merepotkan orang lain, dan saya berusaha sendiri," tandasnya.

Tinggal di Panti Jompo sempat ditawarkan kepada dirin-

ya oleh sebuah yayasan, namun karena Dayu Nadi dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa buang air kecil dan besar sendiri hal itu diurungkan.

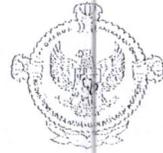
Sementara itu, Ida Bagus Rai Adi, 67, mengatakan jika sejauh ini kakaknya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah baik berupa pengobatan maupun bedah rumah. Sehingga Rai berharap pemerintah dapat melihat kondisi kakaknya yang sangat memprihatinkan.

Dirinya pun mempertanyakan bantuan bedah rumah yang malah diberikan kepada warga yang lebih mampu dibandingkan kakaknya. "Kakak saya sangat butuh obat, dan fasilitas pengobatan, karena sudah puluhan tahun lumpuh seperti ini. Begitu juga bantuan bedah rumah melihat keadaan kamar kakak saya sudah

bocor," ungkapnya.

Prebekel Desa Abian Tuwung, I Gusti Ketut Widiana, yang ditemui Jumat kemarin (25/9) mengatakan jika Dayu Nadi sudah diajukan dalam pendataan warga miskin, namun dari hasil Badan Penanggulangan Kemiskinan Pusat nama nenek tersebut tidak keluar. "Nah siapa saja yang datanya keluar di pusat itu yang kita berikan raskin. Tetapi tahun 2015 sudah mulai didata lagi," terangnya.

Dirinya menambahkan jika sebelumnya Dayu Nadi memang tergabung dalam KK adiknya Ida Bagus Rai Adi, namun saat ini Dayu Nadi sudah ada KK sendiri. "Kita menunggu bantuan dari daerah, maupun dari pusat. Bantuan apa pun yang didapat sudah diberikan," lanjutnya. (* / yes)



Saksi Ahli Sebut BPN Terlibat

Dalam Kasus Dugaan Korupsi Bypass Mantra

DENPASAR - Tiga saksi ahli kasus penjualan aset negara di kawasan Jalan Bypass IB Mantra, menilai pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) mestinya ikut bertanggung jawab. Hal itu disampaikan dalam gelar perkara di Kejati Bali, beberapa hari lalu.

Tiga saksi ahli yang dihadirkan adalah Ahli Pidana Gusti Ariawan; Ahli Pertanahan Cok Dalem Dahana; dan Ahli Hukum Administrasi Negara Gede Sumertayasa. "Tiga ahli ini berpendapat sama," kata sumber koran ini di Kejati Bali, kemarin (25/9). "Yaitu berpendapat bahwa yang bertanggung jawab atas warkah tanah adalah BPN, dan memastikan semestinya unsur BPN menjadi tersangka," sambungnya.

Sumber itu juga menyebutkan bahwa pada gelar perkara tersebut juga diungkapkan nama-nama empat tersangka dalam kasus ini. "Saat gelar perkara, empat sudah mantap menjadi tersangka"

► Baca **Saksi...** Hal 31



■ Menetapkan tiga tersangka tambahan. Yakni I Gede Wayan Bisma (Kades Keramas); I Wayan Sudiasa (Kadus Palak, Keramas), dan I Made Surna, (Kadus Palak, Keramas periode yang berbeda). Sebelumnya, Kejati Bali sudah menetapkan Wayan Bawa (penjual tanah Negara) sebagai tersangka sejak 2011.

■ Tiga saksi ahli yakni; Ahli Pidana Gusti Ariawan; Ahli Pertanahan Cok Dalem Dahana; dan Ahli Hukum Administrasi Negara Gede Sumertayasa, memiliki pendapat yang sama bahwa pihak BPN Gianyar mestinya ikut bertanggung jawab dalam kasus ini.

GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal. : 21



Terlibat dalam Surat Pernyataan

■ SAKSI...

Sambungan dari hal 21

Namun, dalam gelar itu, semua ahli menyatakan BPN mestinya jadi tersangka," ungkapnya.

Dijelaskan, empat orang yang sudah dijadikan tersangka adalah Wayan Bawa, kerap disebutkan BW. Dia malah sudah menjadi tersangka sejak 2011. Sehingga sempat disebut

oleh Kajati Adityawarman "kasus ulang tahun" karena mandeg. Dalam pengembangan terbaru, di bawah ketua tim jaksa Rochida, akhirnya menetapkan tiga tersangka lagi.

Tiga tersangka ini adalah Kades Keramas yaitu I Gede Wayan Bisma dengan peran menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah, dengan posisi mengetahui. Yang

membuat adalah Bawa, namun Kades Bisma hanya mengetahui. Kemudian tersangka ketiga adalah I Wayan Sudiasa Kadus Palak, Desa Keramas, dan terakhir adalah I Made Surna, juga Kadus Palak, Desa Keramas. "Surna beda periode dengan Sudiasa," sebut sumber itu.

Dua Kadus ini, kata sumber itu, bertindak sebagai saksi dalam proses surat penguasaan lahan.

Selain itu, perjalanan kasus secara gamblang sudah didapatkan koran ini. Tahun 1996 ada pembebasan lahan untuk membangun Jalan Bypass IB Mantra. Lahan milik Bawa sudah dijual ke seorang Tionghoa bernama Renaya Parwita. Dari Renaya Parwita, ini yang dijual ke pemerintah. Kemudian tanah sisa dari pembebasan itu juga sudah

menjadi aset negara, namun Bawa memiliki niat nakal.

Aset itu kembali disertifikatkan. Anehnya, meski sudah dijual BPN Gianyar masih bisa mengeluarkan sertifikat. Proses administrasi melibatkan kepala desa dan Kadus. Sehingga Kades dan Kadus ikut jadi tersangka.

Setelah mendapatkan tanah sisa seluas 5 are, ini tanah

dipecah dua oleh Bawa untuk dijual. Seluas 2,5 are dibeli oleh Cangker dan 2,5 are dibeli oleh Marina. Atas kondisi ini Bawa merugikan keuangan negara, lantaran menjual aset negara. Kasus ini sudah diusut oleh Kejati Bali sejak tahun 2011.

Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan saat hendak dikonfirmasi tidak mengangkat telepon. Sedangkan di kejati ke-

marin masih dalam suasana Idul Adha, sehingga beberapa jaksa masih pulang kampung. Namun, salah satu jaksa yang menangani kasus ini Made Tangkas, tidak mau merinci tetapi hanya membenarkan bahwa beberapa waktu lalu memang sempat ada gelar perkara dengan tiga ahli. "Sempat gelar perkara, beberapa waktu lalu," ungkapnya. (art/yes)

Edisi : Septu, 26 September 2015

Hal. : 31